



Munich Personal RePEc Archive

2015 Indonesia Financial Inclusion Level: Case Study On 2015 Susenas Data

Ngasuko, Tri Achya

1 February 2017

Online at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/99151/>
MPRA Paper No. 99151, posted 31 Mar 2020 07:21 UTC

ORIGINAL ARTICLE

Penguatan Fundamental Sektor Keuangan,
Naga Media Press (2017)

2015 Indonesia Financial Inclusion Level: Case Study On 2015 Susenas Data*

Tri Achya Ngasuko^α

^α Center for Financial Sector Policy, Fiscal
Policy Agency, Ministry of Finance
Jakarta 10710, Indonesia

Correspondence

Tri Achya Ngasuko
Center for Financial Sector Policy, Fiscal
Policy Agency, Ministry of Finance,
Jakarta 10710, Indonesia
Email:
ngasuko@gmail.com

Presidential Regulation (Perpres) No. 82 of 2016 concerning the National Inclusive Financial Strategy established on September 1, 2016, is one of the Government's efforts to improve public access to financial services. A survey from several foreign survey institutions such as the World Bank states that the level of financial inclusion is still low. On the other hand, the Central Statistics Agency, for the first time, released the results of a survey on the use of savings by the community in the 2015 Susenas. This paper contributes to finding out the level of financial inclusion at the national and provincial levels. This paper also helps to confirm whether the survey results from abroad are following the survey results from the Central Statistics Agency in the 2015 National Socio-Economic Survey. The results of the study indicate that nationally the level of financial inclusion shown from the use of savings and loans is 35.7% and 5.52%. Whereas at the provincial level, the average utilization of savings and credit at formal financial institutions at the provincial level is 1.05% and 0.13%. Households in provinces located on the island of Java and several regions outside Java, such as North Sumatra and South Sulawesi, generally access financial services both savings and credit far above the national average. This finding also shows that the level of financial inclusion in several provinces in Java is higher than in regions outside of Java.

Keywords : Financial Inclusion, Banks, Digital Financial Services, Susenas 2015

JEL Code : D14, G21, G28, G51

* Most of the contents of this article have been published in the the anthology book series "Penguatan Fundamental Sektor Keuangan", Naga Media Press (2017), with the same title.

ARTIKEL ASLI

Penguatan Fundamental Sektor Keuangan,
Naga Media Press (2017)

Level Keuangan Inklusif Indonesia 2015: Studi Kasus Data Susenas 2015

Tri Achya Ngasuko^α

^α Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan
Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
Jakarta 10710, Indonesia

Korespondensi

Tri Achya Ngasuko

Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan
Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
Jakarta 10710, Indonesia

Email:

ngasuko@gmail.com

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang ditetapkan tanggal 1 September 2016 merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan aksesabilitas masyarakat terhadap layanan jasa keuangan. Survey dari beberapa lembaga survey luar negeri seperti World Bank menyatakan bahwa level keuangan inklusif masih rendah. Di sisi lain, Badan Pusat Statistik untuk pertama kalinya merilis hasil survey tentang pemanfaatan tabungan oleh masyarakat dalam Susenas 2015. Tulisan ini berkontribusi untuk mengetahui level keuangan inklusif di tingkat nasional maupun propinsi. Tulisan ini juga berkontribusi untuk mengkonfirmasi apakah hasil survey dari luar negeri tersebut sesuai dengan hasil survey dari Badan Pusat Statistik dalam Susenas 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara nasional tingkat keuangan inklusif yang ditunjukkan dari pemanfaatan tabungan dan kredit berturut-turut adalah 35,7% dan 5,52%. Sedangkan di tingkat propinsi, rata-rata pemanfaatan tabungan dan kredit pada lembaga keuangan formal di tingkat propinsi adalah 1,05% dan 0,13%. Rumah tangga di propinsi yang berada di pulau Jawa dan beberapa propinsi di luar Jawa seperti Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan pada umumnya mengakses layanan jasa keuangan baik tabungan maupun kredit jauh di atas rata-rata nasional. Hal ini sekaligus menunjukkan level keuangan inklusif propinsi di Jawa memang lebih tinggi daripada propinsi di luar Jawa.

Kata kunci : Keuangan Inklusif, Bank, Layanan Keuangan Digital, Susenas 2015

Kode JEL : D14, G21, G28, G51

* Sebagian besar isi tulisan ini telah dimuat dalam Seri Bunga Rampai "Penguatan Fundamental Sektor Keuangan", Naga Media Press (2017), dengan judul yang sama

I. PENDAHULUAN

Dalam tahun 2014 Indeks Keuangan Inklusif (IKI) penduduk dewasa Indonesia baru mencapai 36 persen, jauh di bawah IKI dunia yang mencapai 62 persen (Kunt dkk, 2015). Tapi angka IKI ini lebih tinggi dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya yang diadakan pada tahun 2010. Pada tahun 2010, hanya 20 persen penduduk dewasa di Indonesia yang memiliki akses terhadap jasa keuangan. Dibandingkan dengan negara lainnya di ASEAN, seperti Singapura, Malaysia dan Thailand, IKI Indonesia masih jauh tertinggal. IKI negara-negara tersebut berturut-turut sebesar 96 persen, 81 persen, dan 78 persen. Posisi Indonesia hanya sedikit lebih baik dibandingkan dengan Vietnam dan Philipina, yang penduduk dewasanya mempunyai akses ke jasa keuangan sebesar 31 persen (World Bank, 2015).

Upaya peningkatan akses terhadap jasa keuangan telah banyak dilakukan oleh Indonesia, misalnya dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang ditetapkan tanggal 1 September 2016. Dalam Perpres tersebut pemerintah telah mencanangkan gerakan untuk mencapai target keuangan inklusif, dimana dalam tahun 2019 diharapkan sekitar 75 persen penduduk dewasa Indonesia telah memiliki akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal. SNKI berfungsi sebagai pedoman bagi Menteri dan pimpinan lembaga dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan peningkatan keuangan inklusif. Selain itu, SNKI juga berfungsi sebagai pedoman bagi gubernur dan bupati/walikota dalam menetapkan kebijakan daerah yang terkait dengan peningkatan keuangan inklusif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan SNKI, Perpres menginstruksikan untuk membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang bertugas mengarahkan dan membuat kebijakan dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan SNKI. Selain itu, DNKI juga bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SNKI.

Dalam rangka mendukung cita-cita Pemerintah untuk mencapai level keuangan inklusif hingga 75 persen dalam tahun 2019, tentu perlu diketahui posisi keuangan inklusif di Indonesia saat ini. Beberapa hasil kajian dari lembaga asing memang menyatakan bahwa keuangan inklusif Indonesia masih rendah sehingga muncul suatu pertanyaan apakah benar level keuangan inklusif Indonesia memang sedemikian rendahnya. Selanjutnya, bagaimanakah level keuangan inklusif di masing-masing propinsi di Indonesia. Lebih lanjut, apakah ada potensi peningkatan keuangan inklusif dan bagaimana langkah yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dan industri perbankan.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis hasil survei Susenas 2015. Postur Susenas 2015 berbeda dengan Susenas tahun-tahun sebelumnya karena terdapat blok survei terbaru yaitu blok survei tentang akses finansial. Di dalam blok survei tersebut, terdapat pertanyaan tentang bagaimana perilaku rumah tangga di Indonesia menyimpan uangnya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tentunya melengkapi indikator keuangan inklusif yang sudah ada pada Susenas tahun sebelumnya, yaitu seberapa banyak rumah tangga yang sudah mendapatkan kredit dari perbankan. Dengan adanya pertanyaan dalam survei Susenas 2015 tersebut, sangat dimungkinkan untuk menghitung level IKI tahun 2015 di tingkat nasional maupun provinsi. Sepanjang pengetahuan penulis, tulisan ini merupakan tulisan pertama yang menghitung level keuangan inklusif di Indonesia berdasarkan data Susenas 2015.

Berdasarkan paparan diatas, studi ini mempunyai dua tujuan yaitu untuk mengetahui level keuangan inklusif di tingkat nasional dan untuk mengetahui level keuangan inklusif di tingkat provinsi.

II. METODOLOGI

Tulisan ini menggunakan data sekunder dari Susenas tahun 2015 yang dilaksanakan oleh BPS. Survei Susenas 2015 dilaksanakan dua kali dalam setahun, yaitu bulan Maret dan September. Pada bulan Maret, pengumpulan data Susenas mencakup 300.000 rumah tangga sampel yang tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia yang dihitung menggunakan kuesioner Kor dan Konsumsi Pengeluaran. Sementara itu, pengumpulan data Susenas pada bulan September mencakup 75.000 rumah tangga sampel yang dihitung menggunakan kuesioner Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) dan Konsumsi Pengeluaran (KP). Tulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Pengolahan data dilakukan dengan *software* SPSS dan *Microsoft excel*.

III. STUDI PUSTAKA

Keuangan Inklusif

Dalam Perpres No. 82 Tahun 2016 tentang SNKI, dijelaskan bahwa keuangan inklusif merupakan komponen penting dalam proses inklusi sosial dan inklusi ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah. Terdapat beberapa definisi keuangan inklusif. Menurut SNKI, keuangan inklusif didefinisikan sebagai kondisi dimana setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Definisi dari *Consultative Group to Assist the Poor* (CGAP) dalam halaman situsnya sedikit berbeda. CGAP mengartikan keuangan inklusif sebagai keadaan di mana semua orang dewasa usia kerja memiliki akses yang efektif untuk kredit, tabungan, pembayaran, dan asuransi dari penyedia layanan keuangan formal. Sarma (2008) mendefinisikan keuangan inklusif sebagai proses yang menjamin kemudahan akses, ketersediaan, dan penggunaan sistem keuangan formal untuk semua anggota ekonomi.

Akses yang efektif termasuk di dalamnya adalah kenyamanan dalam layanan dengan biaya yang terjangkau oleh para pengguna tanpa mengesampingkan keberkelanjutan usaha para penyedia layanan. Keuangan inklusif dikatakan sukses apabila pengguna layanan keuangan formal lebih banyak daripada pengguna layanan jasa keuangan informal yang ada. Namun demikian, penting juga untuk membedakan antara *involuntary exclusion* dan *voluntary exclusion*. Bank Dunia (2014) mendefinisikan *voluntary exclusion* sebagai suatu kondisi dimana segmen populasi atau perusahaan memilih untuk tidak menggunakan jasa keuangan karena mereka tidak memerlukannya atau karena alasan budaya atau agama.

Dari beberapa definisi keuangan inklusif, pada dasarnya keuangan inklusif mengacu pada proses yang menjamin kemudahan akses, ketersediaan dan penggunaan sistem keuangan formal untuk semua anggota ekonomi. Keuangan inklusif, yang salah satunya ditandai dengan tersedianya akses terhadap layanan keuangan, diyakini akan mendorong pertumbuhan. Kajian dari Boldbaatar dan Lee (2015) terhadap 165 negara dalam kurun waktu 2004-2015 menyatakan bahwa terbukanya akses keuangan akan memberikan dampak kepada pertumbuhan ekonomi, terutama kepada negara berpendapatan rendah. Penelitian Honohan (2007) sedikit berbeda. Penelitian tentang hubungan penggunaan jasa keuangan formal oleh orang dewasa dengan tingkat kemiskinan dan *equality* yang dilakukan lebih dari 160 negara, memberikan beberapa bukti empiris dimana akses rumah tangga yang lebih baik berhubungan dengan koefisien *gini ratio* yang rendah. Namun demikian, ketersediaan akses keuangan tidak berkaitan dengan rendahnya angka kemiskinan.

Di negara berkembang seperti Kolombia, keuangan inklusif telah menjadi salah satu pilar utama strategi pembangunan selama beberapa tahun (Karpowicz, 2014). Satu hal yang mengejutkan adalah fakta bahwa keuangan inklusif ternyata berkaitan erat dengan pembangunan manusia. Indikator pembangunan manusia adalah PDB perkapita, ketimpangan pendapatan, kecakapan membaca dan menulis penduduk dewasa. Hal lain yang berpengaruh terhadap perkembangan keuangan inklusif adalah konektivitas fisik dan elektronik, seperti keberadaan jembatan, jalan, telepon, dan internet. Temuan ini sekaligus mengindikasikan bahwa *financial exclusion* adalah cerminan dari social exclusion. (Sarma dan Pais, 2011).

Kajian Indeks Keuangan Inklusif

Beberapa kajian diatas menunjukkan tentang pentingnya keuangan inklusif dalam pembangunan di suatu negara, baik dalam menurunkan *inequality* ataupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Satu hal yang menjadi perhatian adalah perlunya suatu negara mengetahui seberapa matang tingkat keuangan inklusifnya. Level keuangan inklusif di suatu negara dihitung menggunakan indeks keuangan inklusif. Beberapa peneliti membuat metode tertentu untuk menghitung indeks keuangan inklusif di suatu negara, termasuk membandingkan indeks tersebut dengan negara lain. Berdasarkan perbandingan indeks tersebut, suatu negara dapat mengevaluasi berbagai kebijakan yang telah dibuat sebelumnya, termasuk membuat kebijakan baru lainnya dalam rangka meningkatkan level keuangan inklusifnya.

Terdapat beberapa kajian tentang indeks keuangan inklusif. Honohan (2007) melihat seberapa besar pengaruh kepemilikan rekening pada bank maupun lembaga keuangan mikro terhadap tingkat kemiskinan dan *inequality*. Meskipun penelitian yang dilakukan meliputi lebih dari 160 negara tersebut tidak secara khusus membahas indeks keuangan inklusif, Honohan menyatakan bahwa kepemilikan rekening merupakan salah satu indikator indeks keuangan inklusif. Indonesia yang termasuk dalam salah satu negara sampel survei dinyatakan memiliki level keuangan inklusif sebesar 40 persen.

Peneliti lain yang membangun indeks keuangan inklusif adalah Sarma (2008). Sarma membangun indeks keuangan inklusif yang merupakan sinergi dari tiga dimensi yaitu penetrasi bank, ketersediaan layanan perbankan, dan penggunaan layanan jasa keuangan. Indonesia yang merupakan salah satu sampel dalam penelitian dinyatakan memiliki indeks keuangan inklusif sebesar 0,141 atau peringkat 60 dari 100 negara sampel. Untuk kawasan Asia Tenggara, posisi Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, Thailand, dan Philipina.

Hasil kajian yang tak kalah menarik dilakukan oleh World Bank. Dengan menggunakan metode survei, indeks keuangan inklusif Indonesia berturut-turut pada tahun 2011 dan 2014 adalah 20 persen dan 36 persen. Meskipun telah terdapat peningkatan, angka ini masih jauh dari target pemerintah di akhir tahun 2019, yaitu dengan level keuangan inklusif sekitar 75 persen.

Bank Indonesia juga telah membangun indikator keuangan inklusif untuk mengetahui tingkat keuangan inklusif di Indonesia. Meskipun penulis belum mendapatkan kajian lengkapnya, dalam situs Bank Indonesia dapat dilihat bahwa perhitungan keuangan inklusif nasional dihitung berdasarkan kajian dari Sarma (2008), yaitu keuangan inklusif dihitung berdasarkan dimensi akses, dimensi penggunaan, dan dimensi kualitas.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

BPS telah menerbitkan hasil survei Susenas tahun 2015. Susenas yang merupakan survei data rumah tangga Indonesia menghadirkan Blok XIX tentang akses finansial yang merupakan blok baru yang tidak dijumpai dalam Susenas tahun sebelumnya (Lampiran 1). Dengan adanya tambahan informasi terkait dengan akses keuangan dapat diperoleh beberapa informasi tentang indeks keuangan inklusif di Indonesia yang berasal dari tabungan, baik pada level nasional maupun propinsi. Berdasarkan Blok XIX Susenas 2015, rumah tangga Indonesia menyimpan kelebihan penghasilannya dalam bentuk tabungan pada produk bank, tabungan pada produk nonbank, uang tunai, dan lainnya. Keuangan inklusif merupakan pemanfaatan rekening tabungan pada lembaga keuangan formal sehingga penulis hanya akan menghitung seberapa banyak rumah tangga Indonesia yang menabung hanya pada produk bank saja, baik berupa tabungan, asuransi, tabungan investasi ataupun uang elektronik.

Data hasil survei tentang kemampuan masyarakat untuk menabung akan melengkapi informasi tentang pemanfaatan rumah tangga atas kredit untuk melakukan usaha yang sudah tersedia dalam Susenas beberapa tahun terakhir. Seperti halnya keuangan inklusif atas tabungan, akses kredit yang dihitung hanya kredit yang berasal dari lembaga jasa keuangan formal, yaitu bank. Berdasarkan survei Susenas, rumah tangga dalam melakukan usaha untuk mengakses kredit melalui berbagai macam sumber. Tiga sumber utama yaitu bank, koperasi, ataupun perorangan.

Untuk mempersempit lingkup penelitian, penulis hanya akan melihat seberapa banyak rumah tangga di Indonesia yang memanfaatkan kredit dari bank. Rumah tangga yang mengakses kredit dari bank juga terbagi menjadi dua, yaitu mengakses kredit dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), dimana bunga pinjamannya disubsidi oleh Pemerintah, dan mengakses kredit dengan skema selain KUR, dimana bunga sepenuhnya menjadi beban para kreditor.

Level Keuangan Inklusif Nasional

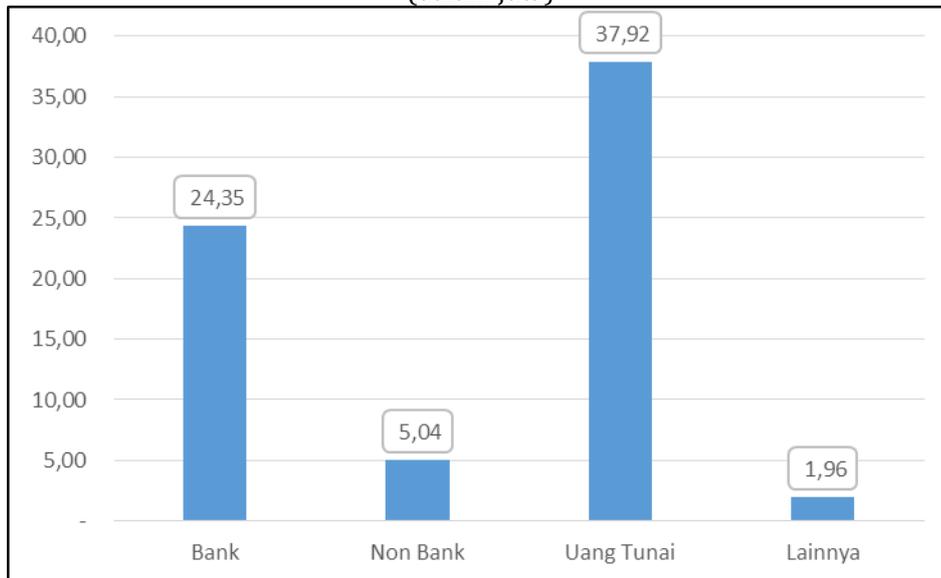
Level keuangan inklusif dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sumbangan keuangan inklusif dari tabungan pada rekening jasa keuangan formal dan sumbangan keuangan inklusif dari pemanfaatan kredit pada jasa keuangan formal. Apabila kita melihat salah satu indikator tabungan sebagai salah satu indikator keuangan inklusif, rumah tangga Indonesia yang memiliki kemampuan menyisihkan penghasilannya untuk disimpan adalah sebanyak 63% atau sekitar 42,9 juta rumah tangga dari total 68,1 juta total rumah tangga di Indonesia (Susenas 2015). Dengan demikian, terdapat rumah tangga yang tidak akan menjadi objek penghitungan indeks keuangan inklusif karena mereka belum memiliki kemampuan untuk menabung, yaitu sebesar 37%. Maka dari itu, golongan ini secara otomatis tidak memanfaatkan layanan jasa keuangan.

Golongan yang mempunyai kemampuan untuk menyisihkan penghasilan untuk ditabung, sebanyak 63% rumah tangga, ternyata juga tidak semuanya memanfaatkan jasa keuangan perbankan dalam menyimpan kelebihan penghasilannya. Masyarakat juga menyimpan kelebihan penghasilannya pada lembaga jasa keuangan nonbank seperti koperasi, kantor pos dan sekolah. Alternatif lainnya adalah mereka tetap menyimpan uangnya dalam bentuk uang tunai.

Gambar 2 memberikan informasi tentang perilaku rumah tangga Indonesia dalam menyimpan kelebihan penghasilannya. Sebanyak 24,35 juta rumah tangga menyimpan uangnya di bank yang merupakan lembaga keuangan formal. Angka inilah yang menunjukkan seberapa besar level keuangan inklusif nasional pada tahun 2015. Sayangnya survei Susenas belum bisa menangkap perkembangan rumah tangga di Indonesia dalam memanfaatkan tabungan pada lembaga jasa

keuangan formal. Hal ini dikarenakan Susenas sebelum tahun 2015 belum menyertakan pertanyaan mengenai hal tersebut. Level keuangan inklusif rumah tangga Indonesia pada tahun 2015 yaitu sebesar 23,45 juta rumah tangga atau setara dengan 35,7% dari jumlah seluruh rumah tangga di Indonesia yaitu sebanyak 68,1 juta rumah tangga. Angka ini paling tidak mengkonfirmasi penelitian dari World Bank yang disusun oleh Kunt dkk (2015) yang menyatakan bahwa penduduk dewasa di Indonesia yang memiliki rekening tabungan adalah sebesar 36,1%.

Gambar 2: Media Menabung Rumah Tangga Indonesia 2015
(dalam juta)



Sumber : Data Susenas 2015 (diolah)

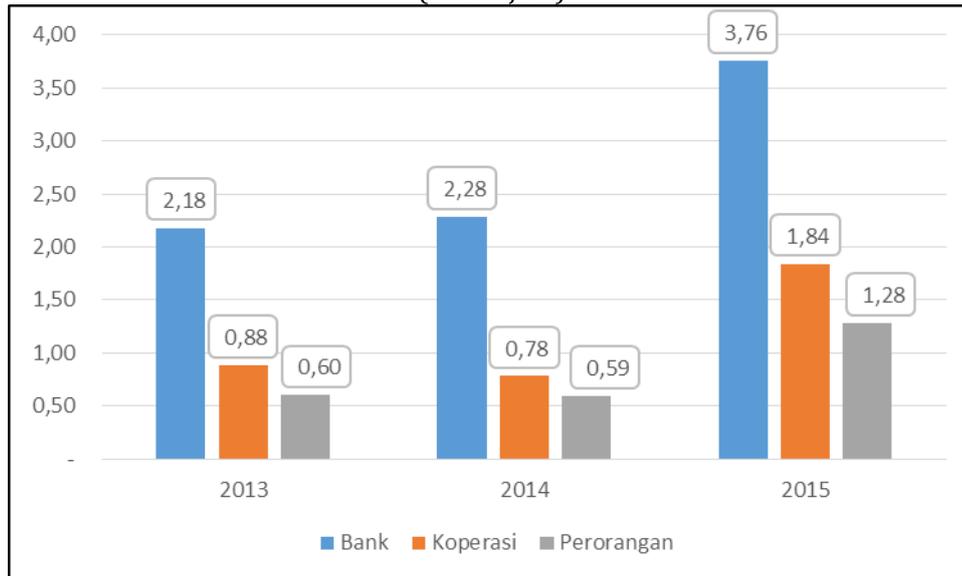
Selain dari tingkat kepemilikan dan pemanfaatan tabungan di rekening jasa keuangan, level keuangan inklusif juga ditunjukkan dari tingkat pemanfaatan kredit oleh penduduk dewasa pada lembaga jasa keuangan formal, dalam hal ini perbankan. Berbeda dengan data survey tentang pemanfaatan tabungan di lembaga keuangan formal yang baru tersedia di Susenas 2015, data survei tentang pemanfaatan kredit di lembaga keuangan formal telah tersedia di Susenas beberapa tahun terakhir. Pemanfaatan kredit dari perbankan berasal dari dua macam, yaitu kredit yang didapatkan rumah tangga dari program KUR ataupun kredit perbankan nonKUR. Kredit KUR merupakan program yang termasuk dalam kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Maka dari itu, KUR bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha mikro dan kecil (TNP2K, 2016). Sedangkan kredit nonKUR adalah kredit secara umum yang bisa diakses oleh seseorang yang memenuhi kualifikasi yang ditentukan oleh pihak bank.

Sumbangan keuangan inklusif dari sektor kredit perbankan terhadap keuangan inklusif masih sangat kecil dibandingkan dengan sumbangan keuangan inklusif dari sektor tabungan di lembaga jasa keuangan. Pemanfaatan kredit perbankan sangat kecil dibandingkan dengan pemanfaatan tabungan di perbankan. Namun demikian, bank masih merupakan pilihan pertama para rumah tangga di Indonesia untuk mendapatkan sumber pembiayaan dibandingkan koperasi dan kredit perorangan. Pemanfaatan kredit perbankan oleh rumah tangga di Indonesia juga telah menunjukkan peningkatan dari 3,41% di tahun 2013 menjadi 3,49% di tahun 2014. Pada tahun 2015, sebanyak

5,52% atau sekitar 3,76 juta rumah tangga Indonesia di 2015 telah memanfaatkan kredit dari lembaga jasa keuangan formal. Angka ini sekaligus menunjukkan level keuangan inklusif 2015.

Tidak seperti hasil perhitungan pemanfaatan tabungan rumah tangga di Indonesia yang telah mengkonfirmasi penelitian dari World Bank yang disusun oleh Kunt dkk (2015), hasil perhitungan pemanfaatan kredit dari lembaga jasa keuangan oleh rumah tangga di Indonesia berbeda dengan hasil kajian dari World Bank. Dalam kajian worldbank, penduduk dewasa yang memanfaatkan kredit dari lembaga keuangan formal mencapai 13,1%.

Gambar 3 : Sumber Kredit Rumah Tangga Indonesia 2013-2015
(dalam juta)



Sumber : Data Susenas 2013-2015 (diolah)

Sumber pembiayaan lain yang pada umumnya dimanfaatkan oleh rumah tangga di Indonesia selain perbankan adalah koperasi dan perorangan. Meskipun rumah tangga yang memanfaatkan kredit masih sangat kecil, data juga menunjukkan bahwa perbankan masih menjadi favorit diantara ketiganya. Hal ini terlihat dari jumlah rumah tangga yang memanfaatkan kredit perbankan lebih banyak daripada koperasi ataupun perorangan. Hal ini juga tidak hanya berlaku di propinsi tertentu, melainkan semua propinsi terjadi hal yang sama.

Level Keuangan Inklusif Propinsi

Setelah mengetahui level keuangan inklusif dalam skala nasional, kita juga dapat melihat lebih jauh keuangan inklusif pada level propinsi. Kepemilikan rekening tabungan di lembaga keuangan formal pada tahun 2015 terlihat Tabel 1. Persentase kepemilikan rekening merupakan level keuangan inklusif masing-masing propinsi.

Dalam 1 tabel terlihat bahwa pada tahun 2015, rata-rata persentase kepemilikan tabungan oleh rumah tangga di Indonesia hanya 1,05%. Susenas juga menunjukkan bahwa banyak diantara propinsi di Indonesia berada di bawah rata-rata. Hanya rumah tangga yang berada di propinsi di pulau Jawa dan sedikit propinsi di luar Jawa seperti Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan yang memiliki tabungan diatas rata-rata nasional.

Tabel 1 : Kepemilikan Rekening Tabungan pada Lembaga Keuangan Formal 2015

No	Propinsi	Pemilik Rekening	KI 2015	Rata-rata
1	Aceh	342.423	0,50	1,05
2	Sumatera Utara	1.092.998	1,60	1,05
3	Sumatera Barat	425.532	0,62	1,05
4	Riau	606.633	0,89	1,05
5	Jambi	305.598	0,45	1,05
6	Sumatera Selatan	540.726	0,79	1,05
7	Bengkulu	138.014	0,20	1,05
8	Lampung	419.643	0,62	1,05
9	Kepulauan Bangka Belitung	129.613	0,19	1,05
10	Kepulauan Riau	337.416	0,50	1,05
11	DKI Jakarta	1.863.111	2,73	1,05
12	Jawa Barat	4.262.834	6,25	1,05
13	Jawa Tengah	3.506.157	5,14	1,05
14	DI Yogyakarta	603.164	0,88	1,05
15	Jawa Timur	3.744.679	5,49	1,05
16	Banten	1.152.088	1,69	1,05
17	Bali	462.748	0,68	1,05
18	Nusa Tenggara Barat	258.351	0,38	1,05
19	Nusa Tenggara Timur	289.887	0,43	1,05
20	Kalimantan Barat	368.843	0,54	1,05
21	Kalimantan Tengah	247.106	0,36	1,05
22	Kalimantan Selatan	373.382	0,55	1,05
23	Kalimantan Timur	593.686	0,87	1,05
24	Kalimantan Utara	91.647	0,13	1,05
25	Sulawesi Utara	215.508	0,32	1,05
26	Sulawesi Tengah	234.401	0,34	1,05
27	Sulawesi Selatan	860.680	1,26	1,05
28	Sulawesi Tenggara	202.471	0,30	1,05
29	Gorontalo	68.063	0,10	1,05
30	Sulawesi Barat	88.868	0,13	1,05
31	Maluku	118.558	0,17	1,05
32	Maluku Utara	92.302	0,14	1,05
33	Papua Barat	106.388	0,16	1,05
34	Papua	210.781	0,31	1,05
	Jumlah	24.354.299	35,73	

Sumber : Susenas 2015 (data diolah)

Demikian juga dengan data pemanfaatan kredit dari rumah tangga di Indonesia. Level keuangan inklusif masing-masing propinsi dari sisi kredit ditunjukkan dari persentase kepemilikan rekening di masing-masing propinsi. Tabel 2 juga memperlihatkan bahwa pada tiga tahun terakhir, rata-rata rumah tangga yang memanfaatkan kredit dari lembaga jasa keuangan formal/ bank hanya 0,13% dari total rumah tangga di Indonesia.

Seperti halnya terjadi dalam pemanfaatan tabungan, rumah tangga yang mengakses kredit dari lembaga jasa keuangan formal melebihi rata-rata nasional adalah rumah tangga yang berada di pulau Jawa dan beberapa propinsi di luar Jawa yaitu Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan.

Tabel 2 : Kepemilikan Rekening Kredit pada Lembaga Keuangan Formal 2013-2015

No	Propinsi	KI 2013	KI 2014	KI 2015	Rata-Rata
1	Aceh	0,04	0,04	0,08	0,13
2	Sumatera Utara	0,13	0,14	0,25	0,13
3	Sumatera Barat	0,09	0,09	0,15	0,13
4	Riau	0,09	0,09	0,13	0,13
5	Jambi	0,04	0,05	0,07	0,13
6	Sumatera Selatan	0,07	0,06	0,12	0,13
7	Bengkulu	0,04	0,04	0,07	0,13
8	Lampung	0,08	0,07	0,10	0,13
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,01	0,01	0,02	0,13
10	Kepulauan Riau	0,01	0,01	0,02	0,13
11	DKI Jakarta	0,03	0,04	0,05	0,13
12	Jawa Barat	0,63	0,57	0,93	0,13
13	Jawa Tengah	0,76	0,84	1,20	0,13
14	DI Yogyakarta	0,10	0,10	0,21	0,13
15	Jawa Timur	0,58	0,59	0,96	0,13
16	Banten	0,05	0,05	0,13	0,13
17	Bali	0,09	0,08	0,11	0,13
18	Nusa Tenggara Barat	0,05	0,06	0,08	0,13
19	Nusa Tenggara Timur	0,03	0,04	0,05	0,13
20	Kalimantan Barat	0,04	0,04	0,05	0,13
21	Kalimantan Tengah	0,04	0,04	0,05	0,13
22	Kalimantan Selatan	0,04	0,03	0,07	0,13
23	Kalimantan Timur	0,05	0,04	0,08	0,13
24	Sulawesi Utara	0,03	0,03	0,05	0,13
25	Sulawesi Tengah	0,05	0,05	0,09	0,13
26	Sulawesi Selatan	0,13	0,15	0,21	0,13
27	Sulawesi Tenggara	0,03	0,03	0,04	0,13
28	Gorontalo	0,03	0,03	0,04	0,13
29	Sulawesi Barat	0,02	0,02	0,02	0,13
30	Maluku	0,01	0,01	0,02	0,13
31	Maluku Utara	0,01	0,01	0,02	0,13
32	Papua Barat	0,01	0,01	0,01	0,13
33	Papua	0,02	0,03	0,04	0,13
Jumlah		3,41	3,49	5,52	

Sumber : Susenas 2013-2015 (data diolah)

Implikasi Kebijakan dari Level Keuangan Inklusif di Indonesia

Level keuangan inklusif masing-masing propinsi di Indonesia baik dari sisi pemanfaatan rekening tabungan dan dari sisi pemanfaatan kredit perbankan telah ditunjukkan di tabel 1 dan 2. Indonesia dalam SNKI memiliki target untuk mencapai level keuangan inklusif sebesar 75% pada akhir 2019. Dengan adanya informasi diatas, pemerintah harus menyusun langkah kongkrit untuk mencapai target tersebut.

Hal yang tak kalah pentingnya adalah pemerataan atas akses kepada lembaga jasa keuangan. Tercapainya target keuangan inklusif di tahun 2019 dirasa kurang berarti apabila keuangan inklusif tidak merata di seluruh propinsi, khususnya propinsi di luar pulau Jawa. Tidak dipungkiri bahwa salah satu yang menghambat perkembangan *supply* dan *demand* layanan jasa keuangan formal adalah ketersediaan infrastruktur. Hal ini sesuai dengan kajian dari Sarma dan Pais (2011) yang menyatakan bahwa perkembangan keuangan inklusif dipengaruhi konektivitas infrastruktur seperti jembatan, jalan, telepon, dan internet. Dengan adanya infrastruktur maka akan terjadi interaksi sosial kemasyarakatan yang pada akhirnya komunitas itu membutuhkan suatu layanan jasa keuangan.

Sampai dengan 2020, Indonesia membutuhkan dana untuk infrastruktur sampai dengan 5.300 triliun rupiah. Percepatan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah dengan fokus pembangunan di luar Jawa dirasa sudah tepat untuk mengejar ketertinggalan dari propinsi di pulau Jawa. Dengan adanya mega proyek infrastruktur oleh Pemerintah diharapkan akan menggerakkan ekonomi di daerah dan pada akhirnya mendorong adanya *demand* atas layanan jasa keuangan. Apabila *demand* sudah terbentuk, rasanya industri perbankan akan cepat untuk menangkap peluang tersebut. Industri perbankan tidak mungkin mendahului untuk menyediakan *supply* karena terkendala dengan mahalnya biaya pendirian suatu kantor cabang. Penyediaan layanan jasa keuangan formal yang mahal memerlukan suatu solusi.

Salah satu solusi yang cukup mengemuka dalam beberapa tahun terakhir adalah adanya suatu program branchless banking, atau layanan perbankan tanpa kantor. Definisi branchless banking menurut Lyman dkk (2006) dalam Dermish dkk (2012) adalah saluran distribusi baru yang memungkinkan lembaga keuangan dan pelaku komersial lainnya menawarkan layanan keuangan di luar bank. *Branchless banking* memungkinkan nasabah melakukan transaksi keuangan dasar seperti menabung dan menarik uang di toko ritel, dengan menggunakan teknologi yang tersedia bagi nasabah dan pegawai toko menggunakan media kartu atau telepon seluler untuk mengamankan dan mengotorisasi transaksi dengan benar.

Branchless banking memiliki potensi besar untuk memperluas distribusi layanan keuangan kepada masyarakat miskin yang tidak terjangkau oleh jaringan cabang bank tradisional. Ivatury dan Mas (2008) memaparkan bahwa *branchless banking* memiliki beberapa karakteristik antara lain;

- a. Menggunakan teknologi, seperti telepon seluler dan kartu pembayaran. Hal ini untuk mengidentifikasi pelanggan dan merekam transaksi secara elektronik.
- b. Menggunakan bantuan pihak ketiga, seperti toko atau kantor pos. Mereka akan berfungsi sebagai agen yang melayani kebutuhan pelanggan
- c. Menawarkan setidaknya layanan setoran tunai dan penarikan dana disamping layanan pembayaran tagihan
- d. Mendapatkan dukungan dari Pemerintah dan lembaga pengumpul dana, seperti bank resmi.
- e. Adanya peraturan resmi sehingga pelanggan dapat menggunakan layanan jasa keuangan secara reguler tanpa perlu pergi ke bank

Dalam sistem branchless banking, perbankan dapat mengeliminasi biaya pendirian kantor cabang yang cukup mahal. Sistem ini juga dapat menggerakkan ekonomi masyarakat untuk berperan sebagai agen bank yang melayani masyarakat di sekitarnya.

Data dari Bank Indonesia tentang keuangan inklusif memang mengindikasikan bahwa memang terdapat kekurangan *supply* atas layanan jasa keuangan di daerah, terutama di luar pulau Jawa. Paling tidak hal ini terlihat dalam data kantor layanan bank dan mesin ATM. Data dari Bank Indonesia dalam Statistik Sistem Keuangan (SSKI) Indonesia bulan Pebruari 2017 menunjukkan bahwa kurang lebih 60% kantor bank di Indonesia ada di pulau Jawa. Bahkan, kurang lebih 65% mesin ATM memberikan layanan kepada masyarakat yang berada di pulau Jawa.

Namun demikian, apabila dilihat dari perbandingan layanan jasa keuangan tersebut per 100 ribu penduduk dewasa, ketersediaan kantor bank dan mesin ATM di seluruh pulau di Indonesia sudah merata. Pada tahun 2016, rata-rata 15 sampai dengan 19 kantor bank melayani 100 ribu penduduk dewasa. Demikian pula dengan mesin ATM, rata-rata 44 sampai dengan 61 mesin ATM melayani 100 ribu penduduk dewasa. Data Bank Indonesia juga menyatakan bahwa terdapat 138 kantor bank dan 521 mesin ATM tiap 1000 km² di pulau Jawa. Hal ini berbanding terbalik apabila dibandingkan dengan Maluku dan Papua yang hanya mempunyai 1 kantor bank dan 4 mesin ATM tiap 1000 km² (SSKI, 2017). Gambaran diatas menandakan bahwa *supply* industri perbankan, baik kantor bank dan mesin ATM, memang dipengaruhi tingkat densitas penduduk di suatu wilayah. (Lampiran 2)

Hal yang tak kalah menarik tentang keuangan inklusif adalah tentang branchless banking. *Branchless banking* yang mulai mengemuka dalam beberapa tahun terakhir dan bertujuan untuk mengatasi masalah kurangnya layanan perbankan di *remote area* ternyata belum dapat berbicara banyak. Layanan Keuangan Digital (LKD) merupakan program *branchless banking* dari Bank Indonesia. Meskipun telah terjadi peningkatan jumlah agen LKD yang cukup signifikan dari 69 ribu agen pada 2015 menjadi 120 ribu agen pada tahun 2016, ternyata pulau Jawa masih mendominasi jumlah agen LKD yang ada (SSKI 2017). (Lampiran 3)

Namun demikian, jumlah agen LKD yang jauh melampaui keberadaan kantor bank dan mesin ATM di Indonesia mengindikasikan bahwa penduduk yang terlayani dan memanfaatkan layanan jasa keuangan formal meningkat. Dengan berjalannya waktu diharapkan kuantitas dan kualitas layanan keuangan yang diberikan oleh para agen LKD ini dapat ditingkatkan. LKD bisa dikatakan ujung tombak Pemerintah dalam meningkatkan keuangan inklusif di Indonesia.

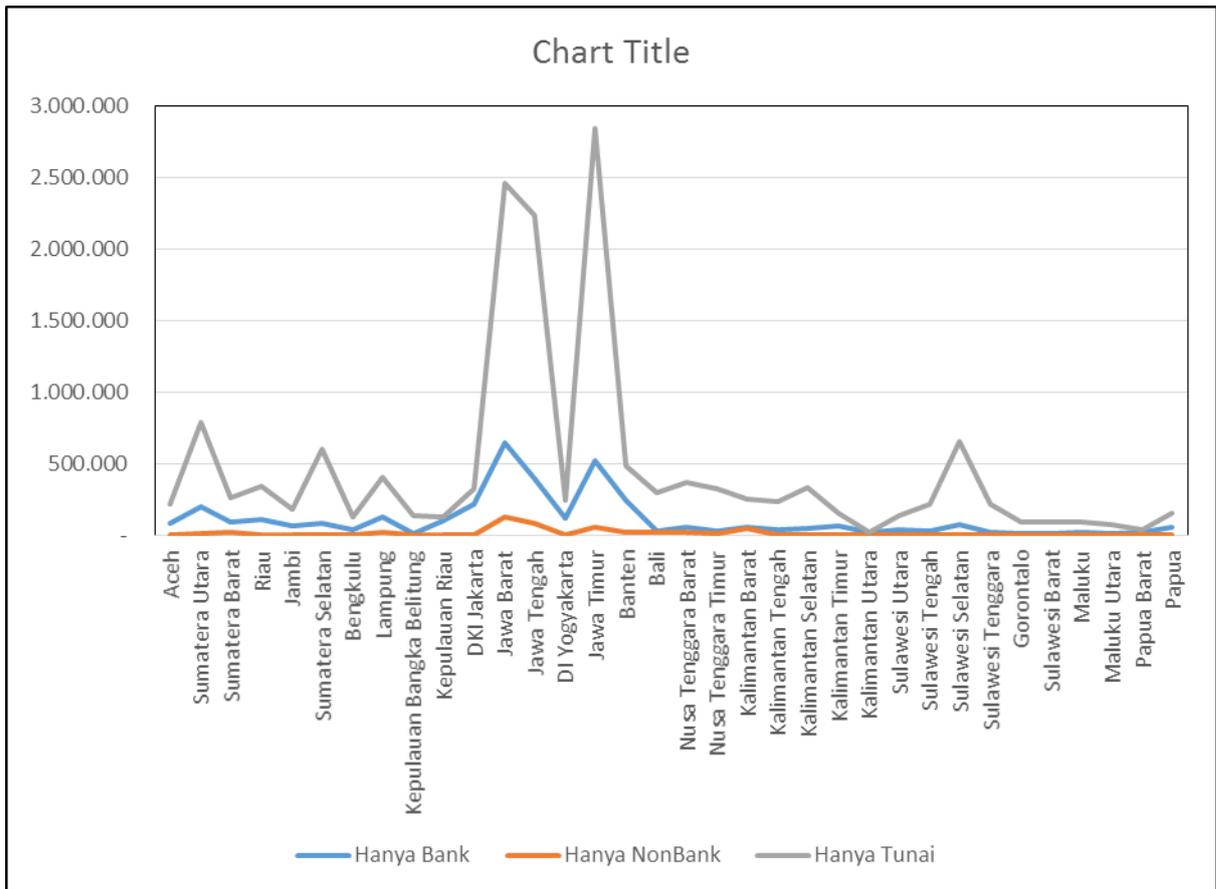
Dengan mengetahui tingkat keuangan inklusif di masing-masing propinsi dari data Susenas dapat dijadikan pertimbangan bagi Pemerintah dan industri perbankan untuk membuka ruang baru peningkatan jumlah LKD yang menjadi ujung tombak keuangan inklusif.

Potensi Peningkatan Keuangan Inklusif

Dari data Susenas menunjukkan adanya potensi peningkatan keuangan inklusif. Salah satunya adalah dari golongan masyarakat yang masih belum menyimpan kelebihan pendapatannya pada lembaga jasa keuangan formal. Masyarakat Indonesia memang tidak fanatik untuk hanya menyimpan di salah satu media penyimpanan, misalnya bank. Meskipun sudah memiliki tabungan di bank, terdapat sekitar 37,92 juta rumah tangga yang juga memiliki simpanan dalam bentuk uang tunai dan 5,04 juta rumah tangga yang juga memiliki simpanan di lembaga nonbank. Apabila lingkupnya dipersempit lagi, terdapat 15,4 juta rumah tangga yang hanya memiliki simpanan dalam bentuk uang tunai dan 453 ribu rumah tangga yang hanya mempunyai tabungan di rekening nonbank (Susenas 2015). Suatu hal yang dimaklumi bahwa uang tunai memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Uang tunai juga diperlukan apabila terdapat kebutuhan mendadak

seperti kecelakaan, keperluan rumah sakit, dan sekolah anak. Namun demikian, jumlah uang tunai yang tersedia di dompet seharusnya lebih sedikit daripada yang tersimpan di bank. Salah satunya adalah pertimbangan keamanan. Tanpa melihat besarnya tabungan di masing masing media penyimpanan uang rumah tangga, data Susenas 2015 menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga yang memilih untuk menyimpan uang dalam bentuk tunai lebih banyak daripada jumlah rumah tangga yang menyimpan dalam bentuk tabungan di lembaga jasa keuangan bank dan nonbank.

Gambar 3: Media Penyimpanan Tabungan Rumah Tangga Indonesia 2015



Sumber : Susenas 2013-2015 (data diolah)

Berdasarkan data Susenas, semua propinsi memiliki karakteristik yang sama dimana jumlah rumah tangga yang hanya memiliki tabungan berupa uang tunai lebih banyak daripada jumlah rumah tangga yang hanya memiliki tabungan di bank dan nonbank. Hal ini mengisyaratkan bahwa semua propinsi berkesempatan untuk menggali lebih jauh potensi dari branchless banking. Potensi terbesar memang masih berada di pulau jawa yaitu di propinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Di propinsi tersebut, rumah tangga yang hanya menyimpan dalam bentuk uang tunai mencapai lebih dari 2 juta rumah tangga, jauh dari rumah tangga yang sudah memanfaatkan bank dalam menyimpan uang yaitu berkisar 500 ribu rumah tangga. Untuk propinsi di luar jawa, Pemerintah dan industri perbankan dapat memilih beberapa propinsi untuk mengerjakan lebih fokus LKD yaitu propinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Dalam kaitannya dengan keuangan inklusif, disinilah terdapat potensi peningkatan inklusif dari sisi tabungan. Salah satu manfaat tabungan adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seseorang. Paling tidak, ini terlihat dari kajian Brune *et al.* (2011) mengemukakan bahwa

peningkatan akses keuangan melalui komitmen rekening tabungan di pedesaan Malawi akan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin. Hal ini terjadi karena uang pada tabungan digunakan untuk membeli modal dalam bertani. Maka dari itu, dapat dilihat bahwa memiliki tabungan adalah sesuatu yang dipandang penting untuk mengangkat tingkat kesejahteraan seseorang.

Di sisi lain, fakta bahwa di semua propinsi jumlah rumah tangga yang hanya memiliki tabungan berupa uang tunai lebih banyak daripada jumlah rumah tangga yang hanya memiliki tabungan di bank ataupun nonbank seharusnya mendorong bank untuk membuka kantor cabang baru di wilayah tersebut. Namun demikian, fakta yang menyatakan bahwa pembukaan kantor cabang baru memerlukan biaya besar seharusnya mendorong bank untuk lebih melakukan penetrasi *branchless banking*.

Keuangan inklusif yang pada dasarnya adalah membawa layanan jasa keuangan kepada masyarakat dengan biaya yang terjangkau memerlukan suatu terobosan, salah satunya adalah *branchless banking*. Dalam skema *branchless banking*, bank mendekati diri ke masyarakat melalui seorang agen. Agen *branchless banking* yang merupakan anggota masyarakat di suatu komunitas turut mendorong kemauan masyarakat untuk mencoba memanfaatkan akses layanan jasa keuangan formal. Dengan demikian, *branchless banking* juga merupakan ujung tombak dari keuangan inklusif.

Beberapa kajian telah dilakukan terkait dengan hubungan *branchless banking* dengan keuangan inklusif. Wibowo (2013) menyatakan bahwa kebijakan *branchless banking* akan memungkinkan bank menjangkau *unbanked people* dan masyarakat di *remote area* untuk menerima layanan perbankan. Diniz dkk (2011) menyatakan bahwa suksesnya *branchless banking* dalam meningkatkan keuangan inklusif memerlukan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, pendidikan keuangan juga turut menyukseskan pelaksanaan *branchless banking*. Kajian dari Sundaram dan Siram (2016) sedikit berbeda. Skema *branchless banking* membutuhkan suatu teknologi informasi komunikasi yang ternyata tidak murah. Biaya itu pada akhirnya akan dibebankan juga kepada konsumen. Maka dari itu, penurunan biaya itu harus dilakukan sehingga makin banyak orang yang akan mengakses lembaga jasa keuangan melalui *branchless banking*. Peraturan tentang pelaksanaan *branchless banking* oleh Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*). Sedangkan peraturan tentang agen *branchless banking* diatur dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia.

Dari sisi kredit, peningkatan keuangan inklusif didapatkan dari para rumah tangga yang belum memanfaatkan kredit dari bank. Namun demikian, rasanya sulit untuk mendapatkan sumbangan keuangan inklusif dari sektor pemanfaatan kredit rumah tangga. Hal ini dikarenakan jumlah rumah tangga yang memanfaatkan kredit di lembaga jasa keuangan formal di Indonesia masih sangat kecil. Pada tahun 2015, hanya terdapat sebanyak 5,52% rumah tangga Indonesia yang memanfaatkan kredit dari lembaga jasa keuangan. Di dua tahun sebelumnya, angkanya lebih kecil yaitu 3,41% di tahun 2013 dan 3,49% di tahun 2014.

Meskipun kecil, peluang meningkatkan keuangan inklusif dari sisi pemanfaatan kredit perbankan tetap ada. Seperti halnya di pemanfaatan tabungan di lembaga jasa keuangan formal, peluang peningkatan pemanfaatan kredit berada pada kelompok rumah tangga yang sama sekali belum memanfaatkan kredit dari bank yaitu kredit dari koperasi ataupun kredit dari perorangan. Keberadaan koperasi memang cukup membantu masyarakat. Mungkin sasaran Pemerintah lebih

kepada rumah tangga yang masih mengakses kredit dari perorangan yang pada umumnya mengenakan bunga yang lebih tinggi. Seperti halnya di tabungan, propinsi di Jawa dan beberapa propinsi di luar Jawa seperti Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan merupakan wilayah sasaran peningkatan program.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Level keuangan inklusif dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi pemanfaatan tabungan dan pemanfaatan kredit pada lembaga jasa keuangan formal. Susenas yang merupakan survei kepada rumah tangga di seluruh propinsi di Indonesia menyatakan bahwa level keuangan inklusif rumah tangga di tingkat nasional pada tahun 2015 sebesar 35,7%. Hal ini setara dengan 23,45 juta rumah tangga di Indonesia dari 68,1 juta rumah tangga. Sedangkan level keuangan inklusif dari sisi pemanfaatan kredit secara nasional pada tahun 2015 adalah 5,52%. Hal ini setara dengan 3,7 juta rumah tangga di Indonesia dari 68,1 juta rumah tangga.
2. Rata-rata pemanfaatan tabungan dan kredit pada lembaga keuangan formal di tingkat propinsi adalah 1,05% dan 0,13%. Rumah tangga di propinsi di pulau Jawa dan beberapa propinsi di luar Jawa seperti Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan pada umumnya mengakses layanan jasa keuangan baik tabungan maupun kredit jauh di atas rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan level keuangan inklusif propinsi di Jawa memang lebih tinggi daripada propinsi di luar Jawa.

Saran

Dengan adanya informasi level keuangan inklusif nasional dan masing-masing propinsi, Pemerintah harus menyusun langkah kongkrit untuk mencapai target level keuangan inklusif sebesar 75% pada akhir tahun 2019. Hal ini dikarenakan potensi peningkatan keuangan inklusif tetap ada, khususnya terhadap rumah tangga yang sama sekali belum mengenal dan memanfaatkan lembaga jasa keuangan formal.

Beberapa saran yang perlu kami sampaikan sehubungan dengan mahalnya pembangunan kantor bank adalah hendaknya pemerintah dan industri perbankan harus lebih fokus mendorong program *branchless banking*. Murahanya biaya *branchless banking* dibandingkan dengan pendirian kantor bank secara konvensional mendorong industri perbankan melaksanakannya di seluruh propinsi. Namun demikian, kami menggarisbawahi bahwa potensi pengembangan *branchless banking* terbesar tetap ada pada beberapa propinsi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Hal ini disebabkan bahwa di propinsi-propinsi inilah banyak rumah tangga ditemukan masih menyimpan kelebihan pendapatannya dalam bentuk uang tunai dan sama sekali belum memanfaatkan lembaga jasa keuangan formal seperti bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2017). Statistik Sistem Keuangan Indonesia. Departemen Statistik Bank Indonesia, bulan Pebruari 2017.
- Boldbaatar, M., & Lee, C.L. (2015). Financial Accessibility and Economic Growth. *Journal of East Asian Economic Integration* Vol. 19, No. 2 (June 2015) 143-166. <http://dx.doi.org/10.11644/KIEP.JEAI.2015.19.2.294>
- Brune, L., Giné, X., Goldberg, J., & Yang, D. (2011). Commitments to Save: A Field Experiment in Rural Malawi. *Impact Evaluation Series*, 5748(50), 0–19. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1904244>
- Demirgüç-Kunt, A., & Klapper, L. (2012). Measuring Financial Inclusion: The Global Findex Database. *World Bank Policy Research Working Paper*, 6025(April), 1–61. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-9509-7>
- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., & Van Oudheusden, P. (2015). The Global Findex Database 2014: Measuring Financial Inclusion around the World. *World Bank Policy Research Working Paper* 7255. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-7255>
- Ivatury, G., & Mas, I. (2008). The Early Experience with Branchless Banking. *CGAP Focus Note*, (40), 1–16.
- Karpowicz, I. (2014). Financial Inclusion, Growth and *Inequality*: A Model Application to Colombia. *IMF Working Papers*, (WP/14/166), 1–31.
- Patrick, H. (2007). Cross Country variation in Household Access to Financial Services. *The World Bank*, (February), 1–18. Retrieved from <http://siteresources.worldbank.org>
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)
- Sarma, M. (2008). Index of Financial Inclusion. *Indian Council for Research on International Economic Relations Working Paper* No 215, 1–26.
- Sarma, M., & Pais, J. (2011). Financial inclusion and development. *Journal of International Development*, 23(5), 613–628. <https://doi.org/10.1002/jid.1698>
- Sundaram dan Sriram. (2016). *Branchless banking* Technologies and Financial Inclusion: An Investigation in Vellore District, Tamil Nadu, India. *Indian Journal of Science and Technology*, Vol 9(40), DOI: 10.17485/ijst/2016/v9i40/96097, October 2016
- Wibowo, P.P. (2013) *Branchless banking* setelah Multilicense: Ancaman atau Kesempatan Bagi Perbankan Nasional. *Bank Indonesia*
- World Bank. (2014). *Global Financial Development Report 2014: Financial Inclusion*. Washington, DC

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Blok XIX Susenas 2015

BLOK XIX. AKSES FINANSIAL	
1901. APAKAH ADA ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MEMPUNYAI TABUNGAN/SIMPANAN BERUPA UANG?	Ya..... 1 Tidak 5 → 1903
1902. DALAM BENTUK APA TABUNGAN/SIMPANAN ANGGOTA RUMAH TANGGA?	
A. PRODUK BANK (TABUNGAN/ASURANSI/DEPOSITO/GIRO)	
1. TABUNGAN/DEPOSITO/GIRO	Ya.....1 Tidak.....5
2. TABUNGAN ASURANSI	Ya.....1 Tidak.....5
3. TABUNGAN INVESTASI (SAHAM, OBLIGASI, DLL).....	Ya.....1 Tidak.....5
4. UANG ELEKTRONIK/E-MONEY (E-TOLL, FLAZZ, BRIZZI, REKENING PONSEL, DLL)	Ya.....1 Tidak.....5
B. PRODUK NON BANK (KOPERASI/KANTOR POS/SEKOLAH)	
1. TABUNGAN/DEPOSITO	Ya.....1 Tidak.....5
2. TABUNGAN ASURANSI	Ya.....1 Tidak.....5
3. TABUNGAN INVESTASI (SAHAM, OBLIGASI, DLL).....	Ya.....1 Tidak.....5
4. UANG ELEKTRONIK/E-MONEY (TELCO, INDOMARET CARD, DLL)	Ya.....1 Tidak.....5
C. UANG TUNAI (LEMARI, DOMPET, CELENGAN, DLL)	Ya.....1 Tidak.....5
D. LAINNYA (Tuliskan:.....)	Ya.....1 Tidak.....5
1903. APAKAH MENGIKUTI ARISAN UANG?	Ya..... 1 Tidak 5

Sumber : Kuesioner Susenas 2015

Lampiran 2: Data Akses ke Bank

No	Indikator	Sumatera	Jawa	Bali & Nusa Tenggara	Kalimantan	Sulawesi	Maluku & Papua
1	Jumlah Bank per 100rb penduduk	15	16	14	19	14	15
2	Jumlah ATM per 100rb penduduk	42	61	52	57	44	44
3	Jumlah Bank per 1000 km2	13	138	19	4	10	1
4	Jumlah ATM per 1000 km2	34	521	71	12	31	4

Lampiran 3: Data Layanan Keuangan Digital

No	Indikator	Sumatera	Jawa	Bali & Nusa Tenggara	Kalimantan	Sulawesi	Maluku & Papua
1	Jumlah Agen LKD per 1000 km2	56	581	90	15	66	9
2	Jumlah Agen LKD	6.070	17.845	1.382	2.121	1.889	728